

## **BAB VI PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH) di Desa Boba Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada masih belum berjalan baik.

#### **5.1.1 Aspek Organisasi**

Dari hasil wawancara yang dilakukan banyak masyarakat yang masih belum merasakan peran aktif dari para penanggung jawab program BRLH peneliti menyimpulkan :

Dalam aspek organisasi, belum sepenuhnya keterlibatan dari pihak-pihak terkait dengan program BRLH menjadi pelaksana, seperti aparat Kecamatan, Desa, dan masyarakat. Kemampuan TPK dalam melakukan pendampingan kepada penerima bantuan mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan hanya ada 1 TPK dalam 1 Kecamatan untuk melakukan pendampingan kepada penerima bantuan. Sehingga kesulitan untuk menjangkau ke seluruh wilayah Kecamatan dalam melakukan pendampingan kepada penerima bantuan.

#### **5.1.2 Aspek Interpretasi**

Dalam aspek intepretasi, masih ada dari pelaksana yang pemahamannya terbatas mengenai program BRLH. Seperti ketidaktahuannya terhadap siapa saja yang bertanggung jawab dengan program tersebut. Kinerja dari Dinas Sosial Koabupaten Ngada belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

### **5.1.3 Aspek Penerapan**

Dalam aspek penerapan, Jumlah nominal bantuan yang sebesar Rp. 10.000.000, jika diberikan dalam bentuk barang itu tidak sampai sebesar nominal tersebut. Karena adanya pemotongan keuntungan untuk pihak ketiga sebagai penyedia barang, dan pajak antara Rp. 2.000.000, hingga Rp. 3.000.000. Sosialisasi program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ngada juga belum berjalan optimal. Karena belum sepenuhnya sosialisasi mengenai program BRLH menyentuh masyarakat. Sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya program tersebut. Kemudian, dalam proses penyeleksian calon penerima bantuan dan pencairan dana pun tidak memiliki kepastian waktu yang jelas. Pihak ketiga sebagai penyedia barang kurang transparan dalam memberikan barang kepada penerima bantuan. Praktik KKN pun ditemukan dalam pelaksanaan program BRLH. Dimana ada masyarakat yang mengikuti program tersebut tidak melalui proses seleksi, melainkan titipan dari Anggota Dewan kepada Dinas Sosial, maupun dari orang terdekat di Dinas Sosial Kabupaten Ngada. Serta pemahaman dan pengetahuan dari para penerima bantuan program BRLH yang masih terbatas.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH) di Kabupaten Ngada, dapat berjalan optimal. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Ngada dengan pihak yang terkait dalam program BRLH seperti Kecamatan,

Desa, Tokoh Masyarakat, RT/RW dan masyarakat agar mereka ikut terlibat dalam melaksanakan program BRLH. Dengan cara melakukan pendekatan persuasif dan memberikan pengarahan secara terus menerus oleh Dinas Sosial Kabupaten Ngada kepada pihak-pihak yang terkait dengan program tersebut. Kemudian perlu adanya penambahan TPK di setiap Kecamatan agar optimal dalam melakukan pendampingan kepada penerima bantuan.

2. Perlu adanya peningkatan wawasan dari para pelaksana untuk lebih memahami mengenai program BRLH dan memahami kewenangannya masing-masing, dengan cara memberikan pelatihan tentang pelaksanaan program BRLH. Kinerja dari Dinas Sosial Kabupaten Ngada perlu ditingkatkan dengan cara ikut terlibat langsung pelaksanaan program BRLH di lapangan, seperti melakukan pendataan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat.
3. Bentuk bantuan program BRLH lebih baik diberikan dalam bentuk uang tunai dari pada berbentuk barang. Kemudian, Dinas Sosial Kabupaten Ngada harus turun langsung dalam memberikan sosialisasi di setiap Rukun Tetangga (RT). Selain itu, perlu dicantumkan jadwal penyeleksian dan proses pencairan dana dalam prosedur program BRLH.
4. Peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan program BRLH baik di lingkungan Dinas Sosial, Kecamatan, Desa, maupun diantara para penerima bantuan perlu dilakukan agar tidak terjadi praktik KKN dan manipulasi dalam pembuatan laporan. Peningkatan wawasan dari para

penerima bantuan juga perlu dilakukan agar lebih memahami tentang program BRLH, dengan cara memberikan arahan secara menerus oleh TPK dan pelaksana, khususnya pelaksana yang ada di tingkat Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, (2012) *Kebijakan Publik*, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika
- Afandi, Muhammad, (2011) *Penelitian Tindakan Kelas Dasar dan Umum*. Bandung
- Ali, F. & Alam, A.S. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung
- Arikunto, S. (2013) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta
- Darmidi, Hamid (2011) *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung
- Husein Umar, (2013) *Metode Penelitian Untuk Tesis dan Sripsi*. Jakarta
- Jones, C.O. (1996) *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kaufman, Roger A. (1972). *Educational System Planning*. New Jersey
- Khotimah, (2019) *Analisi Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Mesuji Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Lampung
- Monica, (2019) *Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah Menurut Peraturan Menteri No.13 tahun 2016*, Jambi
- Nugraha, (2014) *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Di Kota Serang*, Serang
- Pasalog, Harbani.2010. *Teori administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung
- Safi'I, (2019) *Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Riau*, Riau
- Sugiyono, (2013) *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung
- Siregar, (2021) *Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin Di Kecamatan Sungai Kanan*, Medan